EVALUASI KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Adefitri Amalia^{1*}, Wa Ode Suharni², La Ode Muhammad Arham³, Nurfiyani⁴
1.2.3.4. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton

¹ fitri.fitry654@gmail.com, ² suharniharni392@gmail.com, ³ arhamode108@gmail.com,
⁴ fifinurfiyani114@gmail.com

*Penulis Koresponden

diajukan: 28 Mei 2024,

diterima: 9 Juli 2024.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber data sekunder, termasuk dokumen resmi, laporan penelitian sebelumnya, literatur akademik, dan berita dari media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ini masih rendah. Indikator-indikator rendahnya kepatuhan masyarakat mencakup pembuangan sampah sembarangan, partisipasi yang minim dalam kegiatan kebersihan, dan rendahnya pemanfaatan fasilitas kebersihan yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur kebersihan, serta penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui program-program kreatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, penyediaan dan peningkatan fasilitas kebersihan, penegakan hukum yang konsisten dan adil dengan pendekatan edukatif, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program partisipatif dan pembentukan komunitas kebersihan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari kota-kota lain yang telah berhasil dalam pengelolaan kebersihan, seperti Surabaya dan Bandung. Surabaya berhasil melalui partisipasi aktif masyarakat dan insentif, sedangkan Bandung mengandalkan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Dengan mengadaptasi praktik-praktik terbaik dari kota-kota ini, Kota Baubau diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009 dan menjaga kebersihan serta kualitas hidup warganya.

Kata Kunci: kepatuhan masyarakat, Perda kebersihan, sosialisasi, fasilitas kebersihan, penegakan hukum

Abstract

This research aims to evaluate the level of compliance of the people of Baubau City with Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Cleanliness Management. The research method used is a literature study, which examines various secondary data sources, including official documents, previous research reports, academic literature, and news from the mass media. The research results show that public compliance with this regulation is still low. Indicators of low community compliance include littering, minimal participation in cleaning activities, and low utilization of cleaning facilities provided by the government. Some of the main factors that influence community compliance are a lack of awareness and understanding of the importance of maintaining cleanliness, limited hygiene facilities and infrastructure, as well as weak and inconsistent law enforcement. To increase community compliance, this research recommends several strategies, including increasing socialization and education through creative programs involving various elements of society, providing and improving hygiene facilities, consistent and fair law enforcement with an educational approach, and increasing community participation through programs. participatory programs and the formation of cleanliness communities. This research also highlights the importance of learning from other cities that have been successful in managing cleanliness, such as Surabaya and Bandung. Surabaya succeeded through active community participation and incentives, while Bandung relied on technological innovation in waste management. By adapting the best practices from these cities, Baubau City is expected to increase the level of community compliance with Regional Regulation Number 6 of 2009 and maintain the cleanliness and quality of life of its citizens.

Keywords: community compliance, local regulations on cleanliness, socialization, cleanliness facilities, law enforcement

1. PENDAHULUAN

Kota Baubau, sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki tantangan besar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat telah menyebabkan berbagai masalah kebersihan, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan estetika kota. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Baubau telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan. (peraturan.bpk.go.id, 2009) Peraturan ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek pengelolaan kebersihan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penegakan sanksi bagi pelanggar aturan kebersihan. Perda tersebut telah diterapkan selama lebih dari satu dekade, masalah kebersihan di Kota Baubau masih menjadi perhatian utama. Banyaknya tumpukan sampah di berbagai sudut kota, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap Perda ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Salah satu indikator utama dari kepatuhan masyarakat adalah sejauh mana masyarakat mematuhi aturan dalam Perda terkait dengan pembuangan sampah dan partisipasi mereka dalam kegiatan kebersihan. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, perlu juga ditinjau faktor-faktor seperti pemahaman masyarakat terhadap isi Perda, efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, serta ketersediaan dan kualitas fasilitas kebersihan.

Kota Baubau, sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki tantangan besar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat telah menyebabkan berbagai masalah kebersihan, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan estetika kota. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Baubau telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan. Peraturan ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek pengelolaan kebersihan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penegakan sanksi bagi pelanggar aturan kebersihan. Perda tersebut telah diterapkan selama lebih dari satu dekade, masalah kebersihan di Kota Baubau masih menjadi perhatian utama. Banyaknya tumpukan sampah di berbagai sudut kota, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap Perda ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Salah satu indikator utama dari kepatuhan masyarakat adalah sejauh mana masyarakat mematuhi aturan dalam Perda terkait dengan pembuangan sampah dan partisipasi mereka dalam kegiatan kebersihan. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, perlu juga ditinjau faktor-faktor seperti pemahaman masyarakat terhadap isi Perda, efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, serta ketersediaan dan kualitas fasilitas kebersihan.

Masalah kebersihan di Kota Baubau bukanlah fenomena baru. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan pun meningkat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pencemaran lingkungan, penurunan kualitas udara, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Salah satu penyebab utama dari masalah kebersihan ini adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan pengamatan dan laporan yang ada, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik di jalan, sungai, maupun tempat-tempat umum lainnya. (Farid Yusuf Nur Achmad, 2024) Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009,

yang jelas-jelas melarang praktik pembuangan sampah sembarangan dan mengatur tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Evaluasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan adalah suatu analisis yang penting untuk memahami bagaimana masyarakat menanggapi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan hidup masih menjadi permasalahan yang signifikan. Penelitian dengan judul "Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan", ditemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat setelah kegiatan (Safitri dkk., 2023). Penelitian lainnya menemukan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah pada dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan kota Dumai masih kurang terlaksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut belum efektif dalam meningkatkan kebersihan dan pertamanan di kota Dumai (Wahyuni & Wahyuni, 2022)

Penelitian serupa menjelaskan bahwa pelaksanaan peraturan desa tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati belum bisa diwujudkan secara maksimal karena beberapa faktor, seperti faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya (Said & Wibawa, 2023). Dalam "evaluasi efektivitas peraturan daerah nomor 22 Tahun 2014 tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi di Kota Palangka Raya)" (2021), ditemukan bahwa peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Palangka Raya masih memiliki beberapa masalah, seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur serta kurangnya partisipasi masyarakat dan ketidaksadaran dalam membayar retribusi yang wajib (Merbu Wahyudi, 2021). Selanjutnya dalam "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pelatihan Pembukuan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak" (2023), ditemukan bahwa peraturan perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment yang memerlukan Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak terutang sendiri. Mitra Usaha Bandeng Presto yang tergabung dalam Paguyuban Ulam Raos Sejahtera merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang harus memahami perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Safitri dkk., 2023)

Dalam sintesis dari penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih. Faktor-faktor seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur, kurangnya partisipasi masyarakat, dan ketidaksadaran dalam melaksanakan peraturan daerah menjadi beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kebersihan dan pertamanan di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kebersihan juga menjadi fokus utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan kebersihan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mereka akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Berdasarkan pengamatan dan laporan yang ada, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik di jalan, sungai, maupun tempat-tempat umum lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009, yang jelas-jelas

melarang praktik pembuangan sampah sembarangan dan mengatur tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Evaluasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan sangat penting untuk mengetahui efektivitas dari peraturan tersebut. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat mematuhi aturan, tetapi juga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Misalnya, apakah kurangnya kesadaran disebabkan oleh minimnya sosialisasi peraturan, ataukah fasilitas yang tersedia tidak memadai? Dalam konteks ini, penelitian kepustakaan menjadi sangat relevan karena dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang dihadapi serta solusi yang telah diterapkan di tempat lain. Dengan mempelajari literatur yang ada, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai pendekatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan di berbagai daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk memahami lebih jauh tentang permasalahan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan, penting untuk mengkaji berbagai teori dan pendekatan yang relevan. Salah satu teori yang sering digunakan dalam studi kebersihan adalah teori perilaku sosial, yang mengkaji bagaimana norma sosial, sikap, dan nilai mempengaruhi perilaku individu. Teori ini dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat mematuhi peraturan kebersihan, sementara yang lain tidak. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kebersihan juga menjadi fokus utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan kebersihan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mereka akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat adalah melalui sosialisasi dan pendidikan. Pemerintah Kota Baubau telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, seperti kampanye kebersihan, penyuluhan, dan pemasangan spanduk atau poster di tempat-tempat strategis. Namun, efektivitas dari upaya-upaya ini masih perlu dievaluasi. Pendidikan lingkungan, baik di sekolah maupun di masyarakat, juga memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku pro-kebersihan. Program pendidikan lingkungan yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dampak negatif dari perilaku tidak bersih. Selain faktor kesadaran dan pendidikan, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kebersihan juga sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan. Fasilitas seperti tempat sampah yang memadai, layanan pengangkutan sampah yang teratur, dan tempat pembuangan akhir yang dikelola dengan baik adalah beberapa contoh infrastruktur yang penting untuk mendukung pengelolaan kebersihan. Jika fasilitas ini tidak tersedia atau tidak memadai, masyarakat akan cenderung tidak mematuhi peraturan kebersihan. Oleh karena itu, evaluasi juga perlu mencakup penilaian terhadap kondisi dan ketersediaan fasilitas kebersihan di Kota Baubau.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar peraturan kebersihan. Perda Nomor 6 Tahun 2009 sudah mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan kebersihan. Namun, seberapa efektif penegakan hukum ini masih menjadi pertanyaan besar. Penelitian ini akan mengkaji apakah sanksi yang diterapkan sudah cukup memberikan efek jera bagi pelanggar, dan apakah ada kendala dalam penegakan hukum yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya manusia, koordinasi antar instansi, dan dukungan masyarakat juga akan menjadi fokus dalam evaluasi ini.

Sebagai bagian dari pendekatan kepustakaan, penelitian ini juga akan mengkaji studi kasus dari daerah lain yang telah berhasil mengatasi masalah kebersihan melalui peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan. Pembelajaran dari daerah lain ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan solusi praktis yang dapat diterapkan di Kota Baubau. Misalnya, beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya dan Bandung telah menerapkan berbagai inovasi dalam pengelolaan kebersihan yang berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat. Surabaya

dikenal dengan program "Surabaya Green and Clean", yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, Bandung telah mengembangkan aplikasi berbasis teknologi untuk memantau dan melaporkan kondisi kebersihan kota.

Pembelajaran dari daerah lain ini akan dianalisis untuk melihat elemen-elemen kunci yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Kota Baubau. Faktor-faktor keberhasilan seperti partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah lokal akan menjadi fokus dalam analisis ini. Latar belakang permasalahan dalam penelitian tentang evaluasi kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Dari rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas kebersihan, hingga tantangan dalam penegakan hukum, semua faktor ini perlu dievaluasi secara komprehensif. Dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini akan mengkaji berbagai literatur dan data sekunder untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah kebersihan di Kota Baubau serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan efektif bagi Pemerintah Kota

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang akan mengkaji berbagai literatur, dokumen resmi, laporan penelitian sebelumnya, serta data sekunder yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang latar belakang permasalahan, teori-teori yang mendasari, serta pengalaman dari daerah lain yang memiliki permasalahan serupa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas beberapa pertanyaan penting, seperti: sejauh mana masyarakat Kota Baubau memahami dan mematuhi Perda tentang kebersihan? Apa saja faktor penghambat utama dalam penerapan Perda tersebut? Dan strategi apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat? Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah Kota Baubau dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah kebersihan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber yang relevan dengan topik evaluasi kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini:

a. Identifikasi dan Pemilihan Sumber

Langkah pertama dalam penelitian kepustakaan adalah identifikasi dan pemilihan sumber yang relevan. Sumber-sumber yang akan digunakan meliputi:

- Dokumen Resmi: Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009, laporan tahunan dari Dinas Kebersihan Kota Baubau, dan dokumen kebijakan lainnya yang terkait dengan pengelolaan kebersihan di Kota Baubau.
- Literatur Akademik: Jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas teori dan praktik pengelolaan kebersihan, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, serta studi kasus dari daerah lain.
- Laporan Penelitian Terdahulu: Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- Media Massa: Berita, artikel opini, dan laporan khusus dari media massa yang membahas isu kebersihan di Kota Baubau.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Setelah sumber-sumber yang relevan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Pencarian Literatur Elektronik: Menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan database perpustakaan universitas untuk mengakses jurnal dan artikel ilmiah.
- Pemeriksaan Arsip Pemerintah: Mengakses dokumen resmi dan laporan dari situs web Pemerintah Kota Baubau dan instansi terkait.
- Pemantauan Media Massa: Mengumpulkan artikel berita dan laporan dari media cetak dan online yang membahas isu kebersihan di Kota Baubau.

c. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis):

- Analisis Isi: Melakukan kajian mendalam terhadap dokumen resmi, laporan penelitian, dan artikel akademik untuk memahami konteks dan isi dari Perda Nomor 6 Tahun 2009 serta implementasinya di lapangan.
- Analisis Tematik: Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur dan data sekunder. Tema-tema ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat, efektivitas penegakan hukum, peran fasilitas kebersihan, serta strategi peningkatan kepatuhan yang berhasil diterapkan di daerah lain.

d. Sintesis Temuan

Temuan-temuan dari analisis data kemudian disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Sintesis temuan ini mencakup:

- Evaluasi Tingkat Kepatuhan: Menilai sejauh mana masyarakat Kota Baubau mematuhi Perda tentang kebersihan berdasarkan data sekunder yang tersedia.
- Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendukung: Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan.
- Rumuskan Rekomendasi: Menyusun rekomendasi berdasarkan temuan penelitian dan pembelajaran dari daerah lain yang telah berhasil dalam pengelolaan kebersihan.

e. Penyusunan Laporan Penelitian

Langkah terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Laporan ini akan mencakup:

- Pendahuluan: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
- Kajian Pustaka: Ulasan literatur yang relevan dengan topik penelitian.
- Temuan dan Pembahasan: Hasil analisis data dan diskusi mengenai temuan utama.
- Kesimpulan dan Rekomendasi: Kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda tentang kebersihan di Kota Baubau.

Dengan metode penelitian kepustakaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Baubau terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009

Berdasarkan analisis data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, terlihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan masih jauh dari yang diharapkan. Data dari Dinas Kebersihan Kota Baubau menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan penegakan hukum, masih banyak

masyarakat yang belum mematuhi peraturan ini. Beberapa indikator rendahnya kepatuhan masyarakat antara lain:

- **Pembuangan Sampah Sembarangan:** Masih banyak ditemui tumpukan sampah di jalan-jalan, pasar, sungai, dan area publik lainnya. Masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan karena kurangnya fasilitas tempat sampah yang memadai dan tidak adanya sanksi yang tegas.
- **Minimnya Partisipasi dalam Kegiatan Kebersihan:** Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti gotong royong dan kampanye kebersihan, masih rendah. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- **Rendahnya Pemanfaatan Fasilitas Kebersihan:** Fasilitas kebersihan yang disediakan oleh pemerintah, seperti tempat pembuangan sampah terpadu dan layanan pengangkutan sampah, sering kali tidak dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang lebih memilih membuang sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya karena alasan praktis.

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

- **Faktor Internal**
 - a) **Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat:** Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi peraturan kebersihan masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak menyadari dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan terhadap kesehatan dan lingkungan.
 - b) **Perilaku dan Kebiasaan:** Perilaku dan kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama sulit diubah dalam waktu singkat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan sering kali diwariskan dari generasi ke generasi dan memerlukan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk mengubahnya.
- **Faktor Eksternal**
 - a) **Sosialisasi dan Pendidikan:** Program sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif. Banyak masyarakat yang mengaku belum pernah mendapatkan informasi yang jelas dan rinci tentang Perda Nomor 6 Tahun 2009 dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
 - b) **Fasilitas dan Infrastruktur Kebersihan:** Ketersediaan dan kualitas fasilitas kebersihan masih terbatas. Tempat pembuangan sampah yang tersedia sering kali tidak memadai atau tidak terawat dengan baik, sehingga masyarakat kesulitan dalam membuang sampah dengan benar.
 - c) **Penegakan Hukum dan Sanksi:** Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2009 masih lemah. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar sering kali tidak konsisten dan kurang memberikan efek jera. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa mereka bisa melanggar peraturan tanpa konsekuensi yang serius.

3) Strategi Peningkatan Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan.

- **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi**

- a) Program Edukasi Lingkungan: Pemerintah perlu mengadakan program edukasi lingkungan yang menyeluruh dan berkelanjutan, baik melalui media massa, sekolah, maupun komunitas. Program ini harus menyampaikan informasi yang jelas dan menarik tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dampak negatif dari perilaku tidak bersih.
- b) Kampanye Kebersihan: Kampanye kebersihan yang kreatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Misalnya, kampanye melalui media sosial, lomba kebersihan antar-kelurahan, dan kegiatan gotong royong yang melibatkan tokoh masyarakat dan selebriti lokal.
- Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Kebersihan
 - a) Penambahan Tempat Sampah: Pemerintah perlu menambah jumlah tempat sampah di berbagai lokasi strategis, seperti jalan-jalan utama, pasar, dan area publik lainnya. Tempat sampah yang tersedia harus mudah diakses dan memiliki kapasitas yang memadai.
 - b) Peningkatan Layanan Pengangkutan Sampah: Layanan pengangkutan sampah perlu ditingkatkan, baik dari segi frekuensi maupun jangkauan. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan sampah, seperti sistem pengelolaan sampah berbasis aplikasi.
- 4) Penegakan Hukum yang Konsisten dan Adil
 - Pengawasan dan Penindakan: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2009 dan memastikan penindakan yang konsisten dan adil. Sanksi yang dijatuhkan harus memberikan efek jera dan disertai dengan pendekatan edukatif.
 - Pelibatan Aparat Penegak Hukum: Kerjasama dengan aparat penegak hukum, seperti polisi dan satpol PP, perlu ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.
- 5) Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - Program Partisipatif: Program-program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat perlu terus dikembangkan. Misalnya, program bank sampah yang mengajak masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah, serta program insentif bagi warga yang menjaga kebersihan lingkungannya.
 - Komunitas Kebersihan: Pembentukan komunitas atau kelompok masyarakat peduli kebersihan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komunitas ini dapat berperan dalam mengorganisir kegiatan kebersihan dan menjadi agen perubahan di lingkungannya.
- 6) Pembelajaran dari Daerah Lain
 - Studi Kasus Kota Lain: Pembelajaran dari kota-kota lain yang telah berhasil mengelola kebersihan lingkungan dapat memberikan inspirasi dan solusi praktis bagi Kota Baubau. Misalnya, Kota Surabaya dengan program "Surabaya Green and Clean" dan Kota Bandung dengan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah.
 - Adaptasi Praktik Terbaik: Praktik-praktik terbaik dari daerah lain perlu diadaptasi dan diterapkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan Kota Baubau. Hal ini meliputi pendekatan partisipatif, penggunaan teknologi, dan program edukasi yang efektif.
- 7) Pembelajaran dari Studi Kasus Daerah Lain

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang strategi peningkatan kepatuhan terhadap peraturan kebersihan, penelitian ini juga mengkaji beberapa studi kasus dari daerah lain yang telah berhasil mengatasi masalah kebersihan. Dua kota yang menjadi fokus adalah Surabaya dan Bandung.

- Surabaya: Program "Surabaya Green and Clean". Surabaya dikenal dengan program "Surabaya Green and Clean" yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Program ini telah berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif yang signifikan. Beberapa elemen kunci dari program ini antara lain:
 - a) Partisipasi Masyarakat: Program ini melibatkan masyarakat secara aktif melalui lomba kebersihan antar-kelurahan, gotong royong rutin, dan edukasi lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya.
 - b) Insentif dan Penghargaan: Surabaya memberikan insentif dan penghargaan bagi kelurahan yang berhasil menjaga kebersihan lingkungannya. Hal ini memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan bersaing secara sehat dalam menjaga kebersihan.
 - c) Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak swasta dalam menyediakan fasilitas kebersihan dan mendukung program edukasi lingkungan. Kolaborasi ini memperkuat sumber daya yang tersedia untuk pengelolaan kebersihan.
- Bandung: Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Sampah
Bandung telah mengembangkan berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan. Beberapa inovasi yang diterapkan di Bandung antara lain:
 - a) Aplikasi Berbasis Teknologi: Bandung menggunakan aplikasi berbasis teknologi untuk memantau dan melaporkan kondisi kebersihan kota. Masyarakat dapat melaporkan tumpukan sampah atau pelanggaran kebersihan melalui aplikasi ini, sehingga pemerintah dapat merespons dengan cepat.
 - b) Bank Sampah Digital: Program bank sampah digital memungkinkan masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dengan lebih efisien. Sampah yang terkumpul dapat ditukar dengan poin atau insentif lain, yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
 - c) Pendidikan dan Sosialisasi Berbasis Teknologi: Pemerintah Kota Bandung menggunakan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang kebersihan lingkungan. Kampanye melalui media sosial berhasil menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat meliputi kesadaran dan pemahaman, fasilitas kebersihan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- Peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui program yang kreatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
- Penyediaan dan peningkatan fasilitas kebersihan yang memadai dan mudah diakses.
- Penegakan hukum yang konsisten dan adil dengan pendekatan edukatif.
- Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program partisipatif dan komunitas kebersihan.
- Pembelajaran dan adaptasi praktik terbaik dari daerah lain yang telah berhasil dalam pengelolaan kebersihan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009 dapat meningkat, sehingga kebersihan kota dan

kualitas hidup masyarakat dapat terjaga dengan baik. Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program-program kebersihan di Kota Baubau.

b. Pembahasan

1. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Kota Baubau tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Kebersihan. Kesadaran lingkungan yang rendah ini sering kali berasal dari kurangnya informasi dan edukasi yang memadai. Sosialisasi mengenai peraturan kebersihan dan dampaknya terhadap kesehatan serta lingkungan masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara efektif. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih sering dijumpai. Edukasi lingkungan yang berkelanjutan dan komprehensif sangat diperlukan untuk membentuk perilaku masyarakat yang peduli terhadap kebersihan. Program-program edukasi perlu dirancang agar dapat diakses dengan mudah oleh semua kelompok masyarakat, termasuk melalui media massa dan media sosial yang populer di kalangan masyarakat.

2. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Kebersihan

Penelitian ini juga menemukan bahwa fasilitas dan infrastruktur kebersihan di Kota Baubau masih belum memadai. Keterbatasan jumlah dan kualitas tempat pembuangan sampah, serta layanan pengangkutan sampah yang tidak teratur, menjadi hambatan utama dalam penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2009. Tanpa fasilitas yang memadai, masyarakat akan kesulitan untuk mematuhi peraturan kebersihan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kebersihan. Penambahan jumlah tempat sampah di lokasi strategis, peningkatan frekuensi layanan pengangkutan sampah, serta pengelolaan tempat pembuangan akhir yang lebih baik, merupakan langkah-langkah yang harus segera diambil. Selain itu, penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan sampah, seperti aplikasi pengelolaan sampah dan bank sampah digital, bisa menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan fasilitas.

3. Penegakan Hukum dan Sanksi yang Lemah

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2009 masih dianggap lemah dan tidak konsisten. Sanksi yang diterapkan sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelanggar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang ketat dan rendahnya koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pemerintah perlu menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten. Namun, penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat represif, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan edukatif. Edukasi yang dilakukan bersamaan dengan penegakan hukum akan membantu masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan, bukan hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena menyadari dampak positifnya bagi lingkungan dan kesehatan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan masih rendah. Banyak warga yang belum terlibat aktif dalam program-program kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan kebersihan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah perlu mengembangkan program-program yang melibatkan warga secara langsung. Contohnya, program gotong royong rutin, lomba kebersihan antar-kelurahan, dan insentif bagi warga yang menjaga kebersihan lingkungannya. Selain itu, pembentukan komunitas atau kelompok masyarakat peduli kebersihan dapat menjadi cara efektif untuk mendorong partisipasi aktif dan membangun rasa tanggung jawab bersama.

5. Pembelajaran dari Studi Kasus Kota Lain

Pembelajaran dari kota-kota lain yang telah berhasil dalam mengelola kebersihan lingkungan memberikan wawasan berharga bagi Kota Baubau. Surabaya dan Bandung, misalnya,

memiliki program dan inovasi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan. Surabaya, dengan program "Surabaya Green and Clean," menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dan insentif dalam menjaga kebersihan. Partisipasi aktif warga dalam lomba kebersihan dan gotong royong, serta pemberian penghargaan bagi yang berhasil menjaga kebersihan, merupakan strategi yang efektif. Kolaborasi dengan pihak swasta juga memperkuat sumber daya yang tersedia untuk program kebersihan. Bandung, di sisi lain, mengandalkan inovasi teknologi untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Penggunaan aplikasi untuk memantau dan melaporkan kondisi kebersihan kota serta program bank sampah digital yang memberikan insentif kepada masyarakat, menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung upaya kebersihan. Edukasi berbasis teknologi informasi juga efektif dalam menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda.

6. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Kota Baubau

Berdasarkan temuan penelitian dan pembelajaran dari daerah lain, beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009 meliputi:

a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

- Program Edukasi Berkelanjutan: Mengadakan program edukasi lingkungan yang menyeluruh dan berkelanjutan melalui berbagai media, termasuk media sosial, radio, televisi, dan kegiatan penyuluhan langsung.
- Kampanye Kebersihan yang Kreatif: Meluncurkan kampanye kebersihan yang menarik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan selebriti lokal.

b. Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Kebersihan

- Penambahan Tempat Sampah: Menambah jumlah tempat sampah di lokasi strategis dan memastikan fasilitas tersebut mudah diakses dan memiliki kapasitas yang memadai.
- Peningkatan Layanan Pengangkutan Sampah: Meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan pengangkutan sampah serta mempertimbangkan penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan sampah.

c. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Adil

- Pengawasan dan Penindakan yang Ketat: Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan memastikan penindakan yang konsisten dan adil dengan sanksi yang memberikan efek jera.
- Pendekatan Edukatif dalam Penegakan Hukum: Menggabungkan pendekatan edukatif dengan penegakan hukum untuk membantu masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan.

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- Program Partisipatif yang Inovatif: Mengembangkan program-program partisipatif yang melibatkan warga secara langsung, seperti gotong royong, lomba kebersihan, dan insentif bagi warga yang menjaga kebersihan.
- Pembentukan Komunitas Kebersihan: Membentuk komunitas atau kelompok masyarakat peduli kebersihan yang berperan dalam mengorganisir kegiatan kebersihan dan menjadi agen perubahan di lingkungannya.

e. Pembelajaran dan Adaptasi Praktik Terbaik dari Daerah Lain

- Adaptasi Praktik Terbaik: Mengadaptasi praktik terbaik dari kota-kota lain yang telah berhasil dalam pengelolaan kebersihan, seperti partisipasi aktif masyarakat di Surabaya dan inovasi teknologi di Bandung.

- Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Komunitas: Membangun kolaborasi dengan pihak swasta dan komunitas lokal untuk memperkuat sumber daya dan dukungan dalam program kebersihan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat Kota Baubau terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor seperti kesadaran dan pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas kebersihan, penegakan hukum yang lemah, dan rendahnya partisipasi masyarakat, menjadi penghambat utama dalam penerapan peraturan ini. Strategi peningkatan kepatuhan masyarakat yang direkomendasikan meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi, penyediaan dan peningkatan fasilitas kebersihan, penegakan hukum yang konsisten dan adil, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembelajaran dan adaptasi praktik terbaik dari daerah lain. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009 dapat meningkat, sehingga kebersihan kota dan kualitas hidup masyarakat Kota Baubau dapat terjaga dengan baik.

REFERENSI

- Farid Yusuf Nur Achmad. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZERO WASTE DI KOTA BAUBAU. *Journal Publicuho*, 7(1), 212–223. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348>
- Merbu Wahyudi. (2021). EVALUASI EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Kota Palangka Raya). *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.37304/jispar.v7i1.646>
- peraturan.bpk.go.id. (2009, September 2). *PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN* [Peraturan.bpk.go.id]. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/17071/perda-kota-bau-bau-no-6-tahun-2009>
- Safitri, C., Damajanti, A., Yulianti, Y., & Rosyati, R. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pelatihan Pembukuan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 6(1). <https://doi.org/10.51213/jmm.v6i1.134>
- Said, N., & Wibawa, I. (2023). PENEKAKAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI EMPIRIS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI DUKUH JONGSO DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI). *Jurnal Suara Keadilan*, 23(2), 257–278. <https://doi.org/10.24176/sk.v23i2.9506>
- Wahyuni, S., & Wahyuni, S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 55–68. [https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1\(2\).9319](https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9319)